



Intervensi yang Tepat: Fungsi Pemerintah Menangani Kegagalan Pasar

Wahyu Muh. Syata

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: wahyumuh.syata@uho.ac.id

Diterima: 27-12-2025 | Disetujui: 07-01-2026 | Diterbitkan: 09-01-2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the economic function of government in addressing market failures and the challenges of its implementation amidst the dynamics of the modern economy. Theoretically, the price mechanism acts as a signal to coordinate supply and demand, but in practice, markets often fail to produce efficiency and fairness simultaneously. Market failures arise from externalities (e.g., pollution), limited provision of public goods, information asymmetry, and imperfect competition such as monopolies and cartels. This research uses a descriptive qualitative method thru literature review and document analysis of books, journals, and policy reports. The findings indicate that state intervention is necessary to maintain economic stability and protect vulnerable groups, especially when externalities, information asymmetry, the unavailability of public goods, and non-competitive market structures (cartels/monopolies) cause distortions. Effective policies must be able to align economic actors' incentives with social goals thru the internalization of social costs, for example, with taxes, technical standards, emission limits, permits, and clean technology incentives. The government also plays a role in providing basic services and public goods thru direct provision, public-private partnerships, or targeted subsidies, accompanied by enhanced transparency and public literacy to reduce information inequality. Conceptually, this intervention aligns with the allocation, distribution, and stabilization functions, which demand data-driven diagnosis and measurable, adaptive, and accountable policy governance.

Keywords: Government Intervention; Market Failure; Public Goods

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi ekonomi pemerintah dalam menangani kegagalan pasar serta tantangan penerapannya di tengah dinamika ekonomi modern. Secara teoretis, mekanisme harga berperan sebagai sinyal untuk mengoordinasikan penawaran dan permintaan, namun dalam praktiknya pasar kerap gagal menghasilkan efisiensi dan keadilan secara bersamaan. Kegagalan pasar muncul akibat eksternalitas (misalnya polusi), keterbatasan penyediaan barang publik, asimetri informasi, serta persaingan tidak sempurna seperti monopoli dan kartel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen dari buku, jurnal, dan laporan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa intervensi negara diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok rentan, terutama saat eksternalitas, asimetri informasi, barang publik yang kurang tersedia, serta struktur pasar nonkompetitif (kartel/monopoli) menimbulkan distorsi. Kebijakan yang efektif harus mampu menyelaraskan insentif pelaku ekonomi dengan tujuan sosial melalui internalisasi biaya sosial, misalnya dengan pajak, standar teknis, batas emisi, perizinan, dan insentif teknologi bersih. Pemerintah juga berperan menyediakan layanan dasar dan barang publik melalui penyediaan langsung, kemitraan publik-swasta, atau subsidi tepat sasaran, disertai penguatan transparansi, dan literasi publik untuk mengurangi ketimpangan informasi. Secara konseptual, intervensi ini selaras dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang menuntut diagnosis berbasis data serta tata kelola kebijakan yang terukur, adaptif, dan akuntabel.

Katakunci: Intervensi Pemerintah; Kegagalan Pasar; Barang Publik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syata, W. M. (2026). Intervensi yang Tepat: Fungsi Pemerintah Menangani Kegagalan Pasar. *Journal of Literature Review*, 2(1), 35-43. <https://doi.org/10.63822/mfbejd96>

PENDAHULUAN

Mekanisme pasar dianggap mendistribusikan sumber daya secara efektif dalam ekonomi pasar bebas dengan menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi permintaan masyarakat, harga berfungsi sebagai penanda atau sinyal yang membantu pengambilan keputusan bagi produsen maupun konsumen. Secara teoritis, pelaku ekonomi bertindak berdasarkan pengetahuan yang tercermin dalam harga pasar, proses ini meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan meningkatkan ketepatan alokasi sumber daya. Namun, pasar tidak selalu beroperasi sebaik itu dalam kenyataan. Ketika eksternalitas seperti polusi terjadi, barang publik tidak tersedia dalam jumlah yang memadai, atau pelaku memiliki akses yang tidak setara terhadap pengetahuan, harga mungkin tidak mencerminkan biaya atau manfaat penuh bagi masyarakat secara akurat. Selanjutnya, monopoli dan kartel adalah contoh pengaturan pasar non-kompetitif yang dapat mengakibatkan distorsi harga dan kesejahteraan pelanggan yang lebih rendah. Keadaan ini mengarah pada kegagalan pasar yang memerlukan tindakan pemerintah untuk mendukung mekanisme pasar, mengatasi distorsi, dan menjamin ekonomi yang lebih adil dan efektif.

Karena penawaran dan permintaan berinteraksi untuk membentuk keputusan tentang produksi dan konsumsi, pasar bebas sering dianggap sebagai metode paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Harga dianggap mampu memberikan sinyal yang tepat tentang apa yang perlu diproduksi, berapa banyak, dan untuk siapa barang dan jasa ditawarkan dalam konteks persaingan sempurna. Kenyataan menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu mencapai efisiensi dan keadilan secara bersamaan. Di satu sisi, efisiensi dan inovasi dapat ditingkatkan oleh persaingan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, hasil yang dihasilkan sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan, baik dalam ketersediaan sumber daya maupun distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa orang-orang dengan uang tunai dalam jumlah besar biasanya mendapatkan lebih banyak lagi dari layanan dasar, sementara kelompok berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkannya.

Kemungkinan kegagalan pasar semakin besar seiring dengan kompleksitas aktivitas ekonomi, penyebaran globalisasi lintas batas, dan kemajuan teknologi informasi. Dinamika pasar menjadi lebih kompleks karena perubahan yang cepat: pilihan konsumen semakin banyak, tetapi praktik dominasi platform digital, penyalahgunaan data, dan kesenjangan digital dapat menyebabkan bentuk ketidakadilan baru; transaksi semakin besar, tetapi risiko distorsi dan spekulasi juga meningkat; informasi memang menyebar lebih mudah, tetapi tidak selalu merata dan seimbang. Eksternalitas, asimetri pengetahuan, kekuatan pasar yang berlebihan, dan perlindungan kepentingan publik yang tidak memadai dapat mengganggu kondisi pasar yang sempurna. Akibatnya, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, egaliter, dan efisien.

Ketika terjadi ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen atau ketika pasar tidak mampu memasok kebutuhan pasar secara efektif, hal ini dikenal sebagai kegagalan pasar. Distribusi sumber daya antara produsen dan konsumen tidak optimal jika persyaratan tertentu tidak terpenuhi (Nia, I. 2023). Seiring dengan perubahan struktur ekonomi, alasan kegagalan pasar juga semakin beragam. Eksternalitas lingkungan yang tidak diinternalisasi adalah contoh utama, di mana kegiatan produksi atau konsumsi menghasilkan efek negatif yang tidak tercermin dalam harga, seperti emisi karbon dan pencemaran udara dan air. Pelaku ekonomi tidak cukup termotivasi untuk mengurangi kerusakan lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan menanggung biaya sosialnya. Ekonomi digital menciptakan jenis kegagalan pasar baru, terutama melalui perusahaan yang memiliki kekuatan pasar besar karena keunggulan data, efek jaringan,

dan integrasi layanan. Situasi ini dapat membatasi inovasi, meningkatkan biaya tidak langsung bagi konsumen, dan mengurangi keragaman pasar dengan melemahkan persaingan, memberikan tekanan pada usaha kecil, dan mendorong munculnya oligopoli atau monopoli baru.

Selain itu, arus informasi yang cepat tidak selalu disertai dengan kualitas dan keterbukaan yang memadai, sehingga masalah ketidaksetaraan informasi menjadi lebih sulit untuk dipecahkan. Dalam hal mengevaluasi risiko, kualitas produk, dan keamanan layanan, konsumen sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama dalam industri perbankan, perawatan kesehatan, dan ritel online. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang fleksibel, kreatif, dan berbasis bukti untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menangani kegagalan pasar secara tepat. Beberapa contoh kebijakan ini termasuk peraturan lingkungan, peningkatan undang-undang persaingan, perlindungan data, serta peningkatan transparansi dan literasi informasi publik. Memastikan bahwa inisiatif tidak menimbulkan masalah baru yang benar-benar merugikan masyarakat, seperti peraturan yang terlalu memberatkan, bahaya moral, atau inefisiensi birokrasi, adalah tugas utama. Akibatnya, upaya untuk menjaga sifat dinamis dan kompetitif pasar serta kemampuannya untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil harus diseimbangkan dengan peran pemerintah dalam memperbaiki inefisiensi pasar.

Jenis kegagalan pasar yang paling umum disebut eksternalitas, yang terjadi ketika tindakan ekonomi orang atau bisnis memengaruhi orang lain atau hal-hal lain secara positif dan negatif tanpa menerima kompensasi yang sama (Khairunnisa Musari, M. 2022). Karena agen hanya memperhitungkan biaya pribadi dan bukan biaya sosial, pasar cenderung menghasilkan output yang berlebihan ketika ada eksternalitas negatif. Contoh yang jelas adalah eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Wonosari terhadap keberadaan industri tahu di antaranya tidak memberdayakan masyarakat sebagai karyawan dan kurangnya pemanfaatan limbah industri tahu dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat misalnya bertani dan beternak (Dewi, R. S., dkk 2019). Alokasi sumber daya menjadi tidak efisien karena efek-efek ini tidak secara otomatis diperhitungkan saat menentukan harga produk. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menginternalisasi biaya sosial agar keputusan produksi mencerminkan biaya sebenarnya bagi masyarakat. Contohnya termasuk pengenaan pajak lingkungan (Pigovian), standar emisi, dan alat lainnya.

Mekanisme pasar tidak hanya mengedapankan sistem ketaatan kepada norma dan etika semata, tetapi menegaskan peran pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengawasan agar pasar berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition) (Haslindah, H. 2022). Alokasi, distribusi, dan stabilitas adalah tiga cara utama pemerintah merespons kegagalan pasar (Putra, S. K., et al. 2025). Ketika pasar tidak berfungsi dengan baik, pemerintah memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien melalui fungsi alokasi. Misalnya, ia menyediakan barang publik seperti infrastruktur, layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan fasilitas umum yang sulit disediakan oleh sektor swasta. Untuk memastikan bahwa biaya dan manfaat sosial diperhitungkan saat membuat keputusan ekonomi, pemerintah juga harus mengendalikan eksternalitas—baik positif maupun negatif—melalui peraturan, pajak, subsidi, dan penetapan standar. Teori pigou dalam Rawung, S. S., dkk (2024) menyatakan bahwa barang publik seharusnya tersedia sehingga adanya kepuasan tambahan terhadap barang publik setara dengan ketidakpuasan tambahan terhadap pajak yang dikenakan untuk mendanai program pemerintah. Sementara itu, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan alat lain yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi guna menghindari fluktuasi ekstrem seperti inflasi tinggi, pengangguran meningkat, atau krisis. Oleh karena itu, untuk menjamin pembangunan terus berlanjut lebih efektif, inklusif, dan adil, pemerintah tidak hanya

memantau aktivitas ekonomi tetapi juga menghilangkan distorsi pasar dan menjaga keseimbangan.

Sehubungan dengan hal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi ekonomi pemerintah guna menyelidiki peran pemerintah dalam mengoreksi kegagalan pasar. Hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan yang terkait dengan penerapan intervensi kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini berfokus pada pengumpulan data non-numerik melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan untuk memahami fenomena kegagalan pasar dan peranan pemerintah dalam mengatasinya secara mendalam dan sistematis. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan artikel akademik untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan pasar serta fungsi-fungsi pemerintah dalam perekonomian, termasuk fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan peran pemerintah dalam mengoreksi kegagalan pasar serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika pasar bebas tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara efektif atau adil, kegagalan pasar muncul, dan pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Agar perekonomian stabil dan pelaku ekonomi diperlakukan secara adil, intervensi ini sangat penting. Melalui penerapan langkah-langkah regulasi yang dipikirkan dengan matang, pemerintah memainkan peran penting dalam memperbaiki kegagalan pasar. Dengan mengatasi inefisiensi ketika tangan tak terlihat gagal, intervensi ini memastikan bahwa pasar berfungsi secara efektif dan adil, sehingga meningkatkan situasi semua orang (Stiglitz & Stiglitz, 2010). Untuk mencegah gangguan lebih lanjut perlu keterlibatan negara, intervensi ini bertujuan untuk memberantas kegagalan pasar (Bartniczak, 2017). Kegagalan pasar harus diatasi melalui intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi, tetapi hanya dengan kebijakan dan pedoman yang jelas (Krueger, 2012).

Desain kebijakan yang benar-benar mampu mengubah insentif pelaku ekonomi agar selaras dengan tujuan sosial sangat penting bagi keterlibatan pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa biaya dan manfaat nyata bagi masyarakat tercermin dalam informasi, harga, dan struktur persaingan pasar. Intervensi dapat berfokus pada "internalisasi" eksternalitas, seperti polusi, kemacetan lalu lintas, atau bahaya kesehatan, melalui alat-alat seperti pajak, standar teknis, batas emisi, program izin, atau insentif teknologi bersih. Dengan cara ini, bisnis akan memperhitungkan biaya sosial selain biaya pribadi.

Untuk menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, negara harus turun tangan melalui penyediaan langsung, kemitraan publik-swasta, atau subsidi yang ditargetkan ketika pasar tidak mampu menyediakan barang publik atau layanan dasar secara memadai karena masalah free rider dan profitabilitas yang rendah. Kebijakan yang berpusat pada transparansi dan perlindungan konsumen juga diperlukan mengingat kegagalan pasar yang disebabkan oleh asimetri informasi. Peraturan pelabelan, standar kualitas, audit, sertifikasi, pengawasan layanan keuangan, dan literasi publik semuanya memainkan peran penting dalam mencegah konsumen

selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Untuk menjaga persaingan pasar, pemerintah harus menegakkan undang-undang persaingan, menghentikan kartel dan monopoli, serta mengawasi merger dan integrasi vertikal yang dapat menghalangi usaha kecil mengakses pasar. Janji pasar tentang efisiensi dan inovasi akan memburuk tanpa persaingan yang kuat. Akibatnya, kualitas tata kelola menjadi faktor penentu: intervensi harus berbasis data, mengatasi akar masalah, memiliki pedoman partisipasi yang jelas, ditinjau secara berkala, dan dibangun dengan sistem akuntabilitas untuk mencegahnya menyimpang dari mandat publik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dapat dilihat sebagai pelengkap pasar, memperkuat fungsinya—menjaga stabilitas, melindungi pihak-pihak yang rentan, dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan lebih adil—tanpa menekan kekuatan utama sistem pasar, yaitu dinamisme dan inovasi.

Dengan memeriksa industri untuk melihat ketidakefisienan dan kurangnya pasar yang signifikan, pemerintah dapat mendeteksi kegagalan pasar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memajukan ekonomi, mereka harus memberlakukan undang-undang dan peraturan lingkungan yang efisien, memfasilitasi sinyal yang lebih baik untuk alokasi sumber daya, dan merangsang investasi serta inovasi (Stern, 2022). Dengan memeriksa faktor-faktor seperti persaingan tidak sempurna, barang publik, eksternalitas, dan asimetri informasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kegagalan pasar. Untuk memaksimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi ekonomi, pemerintah menerapkan intervensi spesifik, seperti undang-undang, subsidi, atau layanan publik, sebagai respons terhadap kegagalan ini (Bede, 2019). Dengan memeriksa industri untuk menemukan inefisiensi dan ketidakadilan, kemudian memberlakukan langkah-langkah pajak dan pengeluaran tertentu, pemerintah dapat menemukan dan memperbaiki kegagalan pasar (Kalambokidis, 2012). Pentingnya peran aktif pemerintah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti kenaikan harga terjadi akibat meningkatnya permintaan, terganggunya distribusi, adanya praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Oleh karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, serta kerja sama dengan distributor lokal guna menjaga stabilitas harga (Dinda Ariandini, et al. 025).

Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kapasitas pemerintah untuk mengidentifikasi masalah pasar. Selain mengidentifikasi "pasar yang hilang" seperti pembiayaan jangka panjang untuk teknologi hijau, asuransi risiko iklim, atau infrastruktur publik yang tidak menarik bagi sektor swasta, identifikasi ini dapat dilakukan dengan memetakan sektor-sektor yang menunjukkan indikator inefisiensi (seperti harga yang tidak mencerminkan biaya sosial, produksi berlebihan atau kurang produksi relatif terhadap tingkat optimal, atau tidak adanya layanan penting). Seperti yang dikemukakan oleh Astrin, L., & Wahyudi, A. (2024) penetapan pembatasan terkait harga pembelian oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), pengawasan/pengendalian pemerintah dapat meningkatkannya terhadap pasar gabah untuk mencegah praktik monopoli atau manipulasi harga yang tidak adil.

Untuk menentukan apakah masalah utama disebabkan oleh persaingan tidak sempurna, barang publik, eksternalitas, atau asimetri informasi, pemerintah dapat menggunakan indikator kinerja pasar seperti tingkat konsentrasi industri, hambatan masuk, kualitas dan keterjangkauan layanan, tingkat emisi/polusi, dan pola distribusi akses. Temuan diagnosis ini signifikan karena kebijakan yang berbeda diperlukan untuk mengatasi berbagai jenis kegagalan pasar. Misalnya, instrumen yang mengubah struktur insentif, seperti pajak karbon, standar emisi, atau skema perdagangan emisi, lebih cocok untuk mengatasi eksternalitas lingkungan, sementara peningkatan transparansi, sertifikasi, kontrol kualitas, dan perlindungan konsumen

diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan ekonomi tidak didasarkan pada informasi yang salah dalam kasus asimetri informasi. Meskipun kegagalan pasar sering kali mengakibatkan inefisiensi dan membebani kelompok rentan secara tidak proporsional dengan risiko dan biaya, seperti komunitas berpenghasilan rendah yang lebih terkena dampak polusi atau pemilik usaha kecil yang tidak mampu bersaing ketika struktur pasar terlalu terkonsentrasi, pemerintah juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan.

Sementara pengeluaran publik difokuskan pada bidang-bidang yang meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang seperti infrastruktur energi, transportasi umum, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi kelompok yang terkena dampak transisi pajak dapat digunakan untuk memperbaiki perilaku berbahaya (seperti emisi atau kegiatan yang menimbulkan biaya sosial). Oleh karena itu, selain "memperbaiki pasar" dalam arti teknis, pemerintah juga menciptakan lintasan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, menurunkan risiko kegagalan investasi, dan memastikan bahwa hasil pembangunan mendorong agenda pertumbuhan yang lebih inklusif daripada memperlebar kesenjangan.

Bakara, S., et al. (2024) mengemukakan bahwa Dalam sistem perekonomian modern, fungsi ekonomi pemerintah menurut perspektif ekonomi publik terbagi menjadi tiga kategori utama: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan dan layanan barang publik yang digunakan secara bersama dan tidak dapat dimiliki secara individu, fungsi distribusi berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan yang optimal. Fungsi stabilitas berkaitan dengan pengaturan variabel ekonomi makro untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional (Khusaini, M. 2019). Contoh fungsi alokasi yaitu ketersediaan udara bersih, jalan umum, jembatan, pendidikan, kegiatan pertahanan, dan keamanan serta keadilan, contoh alokasi distribusi yaitu perpajakan progresif, kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya subsidi yang tepat sasaran, dan kebijakan perlindungan konsumen, dan contoh fungsi stabilitas yaitu melalui kebijakan fiskal (pajak dan pengeluaran) harus dibuat dengan mempertimbangkan konsep-konsep berikut: terfokus, terukur, dan mudah disesuaikan, pengawasan pasar, dan kebijakan sektor riil untuk menekan fluktuasi ekstrem (Ghafur, A., & Fadila, N. 2020).

Efektivitas peran pemerintah dalam perekonomian modern sangat ditentukan oleh bagaimana fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dijalankan secara terpadu dan konsisten. Penyediaan barang publik melalui fungsi alokasi, misalnya, tidak hanya memperkuat kualitas layanan dasar seperti infrastruktur dan pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi. Pada saat yang sama, fungsi distribusi diperlukan agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan dapat dinikmati lebih merata melalui instrumen seperti pajak progresif dan subsidi yang tepat sasaran. Sementara itu, fungsi stabilisasi berperan sebagai penyangga ketika terjadi gejolak, seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, atau peningkatan pengangguran, sehingga pemerintah perlu merespons dengan kebijakan fiskal yang terfokus, terukur, dan adaptif. Dengan demikian, ketiga fungsi tersebut saling melengkapi: alokasi membangun kapasitas ekonomi, distribusi menjaga keadilan sosial, dan stabilisasi memastikan perekonomian tetap berada pada jalur yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara efisien dan adil, sehingga harga tidak lagi mencerminkan biaya maupun manfaat sosial secara tepat. Kondisi

ini dipicu oleh eksternalitas (misalnya polusi), keterbatasan penyediaan barang publik, asimetri informasi, serta struktur pasar yang tidak kompetitif seperti monopoli dan kartel. Akibatnya, muncul distorsi harga, penurunan kesejahteraan konsumen, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar, dan dalam kasus tertentu diperparah oleh dinamika ekonomi modern seperti kompleksitas distribusi, spekulasi, hingga praktik penimbunan. Pemerintah berperan penting sebagai pelengkap pasar melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Intervensi dilakukan dengan internalisasi eksternalitas melalui pajak, regulasi, standar teknis, serta insentif; penyediaan barang publik dan layanan dasar melalui penyediaan langsung, kemitraan publik-swasta, maupun subsidi tepat sasaran; serta perlindungan konsumen dan penguatan transparansi untuk mengurangi asimetri informasi. Selain itu, penegakan hukum persaingan dan pengawasan merger diperlukan agar inovasi dan efisiensi tetap terjaga. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan diagnosis masalah berbasis data serta tata kelola yang terukur, adaptif, dan akuntabel, termasuk pada upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar murah, pengawasan rutin, dan kerja sama distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrin, L., & Wahyudi, A. (2024). Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1586-1598
- Bakara, S., Wulandari, M., Lubis, E. H., Nasution, A. R., Maulana, J., Rahmi, S. N., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 229-236. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6194>
- Bartniczak, B. (2017). Market Failures as Premises of Granting State Aid. *Economic and Environmental Studies*, 17(43), 475–489. <https://doi.org/10.25167/EES.2017.43.2>
- Bede, M. (2019). Ekonomija javnog sektora. <https://dabar.srce.hr/en/islandora/object/unidu%3A1038>
- Dewi, R. S., Murtisari, A., & Saleh, Y. (2019). Dampak Eksternalitas Industri Tahu Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 3(3), 201-209
- Dinda Ariandini, Hieronymus Soerjatisnanta, Firmansyah, A. A., & Sepriyadi Adhan S. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1886–1894. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1461>
- Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran pemerintah dalam ekonomi islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1-18.
- Haslindah, H. (2022). PERAN PEMERINTAH DALM PENGAWASAN HARGA DAN SISTEM PASAR DI INDONESIA. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(2), 140–156. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v2i2.3003>
- Kalambokidis, L. (2012). Creating Public Value with Tax and Spending Policies.
- Khairunnisa Musari, M. (2022). KEGAGALAN PASAR DAN EKSTERNALITAS LINGKUNGAN. *ISLAM DAN GREEN ECONOMICS*, 29.
- Khusaini, M. (2019). Ekonomi publik. Universitas Brawijaya Press
- Krueger, A. O. (2012). Fallas del Gobierno en el desarrollo. 12(1), 215–240. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7288661>
- Nia, I. (2023). Analisis Faktor Faktor Penyebab Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah. *Zabags*

- International Journal of Economy, 1(1), 11-18
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN, 3(6), 408-416
- Rawung, S. S., Rumagit, M. C., & Supriyanto, S. (2024). Buku ajar ekonomi publik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Stern, N. (2022). Towards a Carbon Neutral Economy: How Government Should Respond to Market Failures and Market Absence. Journal of Government and Economics, 6, 100036. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2022.100036>
- Stiglitz, J. E., & Stiglitz, J. E. (2010). Regulation and Failure (Regulación y Fallas) (Spanish). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1724769